
**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA DI DESA TAMBAK KALISOGO JABON
SIDOARJO**

Dewi Lestari^{1✉}, Lailul Mursyidah²

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

e-mail korespondensi lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Efektivitas Program Bantuan Langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori Sutrisno (2007) yang memiliki 5 indikator yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya program, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, Analisis data menggunakan model Interaktif oleh Miles dan Huberman yang memiliki 4 komponen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan dengan cukup efektif, ditandai dengan pemahaman masyarakat yang baik, penyaluran bantuan yang tepat sasaran melalui verifikasi data, ketepatan waktu dalam pencairan setiap tiga bulan, tercapainya tujuan berupa berkurangnya jumlah keluarga penerima manfaat, serta adanya perubahan nyata dalam peningkatan kesejahteraan, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemanfaatan dana untuk usaha kecil. Namun, keterbatasan anggaran dan persepsi sebagian masyarakat mengenai pemerataan bantuan masih menjadi kendala yang perlu ditindaklanjuti. Prospeknya, program ini memiliki potensi besar untuk terus mendukung penanggulangan kemiskinan di tingkat desa apabila disertai evaluasi berkelanjutan dan perbaikan mekanisme pelaksanaan.

Kata kunci: *Efektivitas; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; Kemiskinan*

Abstract

This study examines the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) program in Tambak Kalisogo Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. The study employs Sutrisno's (2007) theory of program effectiveness, which consists of five indicators: program understanding, target accuracy, timeliness, program achievement, and tangible change. A descriptive qualitative research approach was adopted, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman, which comprises four components: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that the BLT-DD program has been implemented with a relatively high level of effectiveness. This is reflected in the community's adequate understanding of the program, the accurate targeting of beneficiaries through a data verification process, the timely disbursement of assistance every three months, the achievement of program objectives as evidenced by a reduction in the number of beneficiary households, and tangible improvements in community welfare through the fulfillment of basic needs and the utilization of financial assistance for small-scale business activities. Nevertheless, budget constraints and public perceptions regarding the equitable distribution of assistance remain challenges that require further attention. Looking ahead, the program demonstrates considerable potential to contribute to poverty alleviation at the village level, provided that it is supported by continuous evaluation and improvements in its implementation mechanisms.

Keywords: *Program Effectiveness; Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD); Poverty.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang masih dihadapi bangsa, yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hingga saat ini, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya teratasi. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu atau keluarga memiliki tingkat pendapatan yang sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, sandang, papan, dan Pendidikan (Fadhiela.ND et al., 2024). Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Hasibuan et al., 2022).

Dalam hal kemiskinan, ada dua faktor yang menjadikan penyebab terjadinya kemiskinan, yakni faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal hal ini ditujukan ke individu ataupun keluarga, yang dilihat disini adalah rendahnya pendapatan dalam keluarga tersebut dan juga rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan, faktor eksternal yaitu dilihat dari kondisi segi sosial dan politik (Bawadi et al., 2023)

Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini semakin memburuk akibat ketidakstabilan pasar keuangan serta pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, termasuk Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Banyak warga kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja di pabrik serta melemahnya sektor informal dan industri kecil yang menjadi penopang ekonomi desa (Amanda, 2022). Kondisi ini meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta menunjukkan bahwa krisis global berdampak langsung pada masyarakat desa yang bergantung pada sektor ekonomi rentan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,57%, menurun sebesar 0,56 persen dibandingkan Maret 2024. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta jiwa (BPS, 2025). Penurunan ini menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan yang positif setelah Indonesia menghadapi dampak serius pandemi. Penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 tidak terlepas dari proses pemulihan ekonomi nasional yang berlangsung pasca pandemi Covid-19. Membaiknya kondisi perekonomian mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga tercipta lapangan-lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja terdampak.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan sosial yang bersifat terintegrasi dari pemerintah pusat juga memainkan peran penting seperti adanya Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga rentan seperti anak sekolah dan ibu hamil, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memastikan akses terhadap kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin. Kehadiran program-program perlindungan sosial ini memperkuat ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi dan sekaligus memberikan jaring pengaman sosial agar mereka tidak semakin jatuh ke dalam jurang kemiskinan (RI, 2025). Selain itu, upaya pengendalian inflasi terhadap komoditas bahan pokok serta kebijakan stabilisasi harga melalui pelaksanaan operasi pasar turut mendukung penurunan tingkat kemiskinan dengan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini menjadi salah satu faktor penting yang menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga miskin di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, di Kabupaten Sidoarjo, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,53% atau sekitar 109,39 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 119,15 ribu jiwa (BPS Sidoarjo, 2024). Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi di daerah, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo yang cukup kuat. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan tingkat pengangguran (Rohman, 2024).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo aktif mendorong pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan dukungan distribusi produk lokal, sehingga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan, meskipun secara nasional Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem yang memerlukan perhatian serius.

Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu untuk memberdayakan masyarakat miskin agar keluar dari kondisi tersebut. Sebagai respons, Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT meluncurkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang bersumber dari Dana Desa sebagai instrumen percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Kebijakan ini merupakan implementasi amanat (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) yang menekankan kesejahteraan dan kemandirian desa, serta memastikan Dana Desa dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program BLT-DD bertujuan meringankan beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat miskin (Nur'aini, 2022). Sejak diluncurkan secara luas pada tahun 2020 sebagai respons atas dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19, BLT-DD menjadi instrumen perlindungan sosial yang menyasar langsung keluarga miskin dan rentan di desa yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Selain membantu pemenuhan kebutuhan dasar, BLT-DD juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa BLT-DD tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi merupakan instrumen pembangunan sosial untuk meredam dampak krisis dan memperkuat ketahanan ekonomi desa. Berdasarkan (PMK No. 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, 2022) tentang Pengelolaan Dana Desa alokasi BLT-DD tahun 2023 ditetapkan sebesar 10%–25% dari total dana desa. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat miskin pedesaan melalui penganggaran yang jelas dan terukur, serta menjadi dasar hukum keberlanjutan pelaksanaan BLT-DD di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.

Di Provinsi Jawa Timur, penyaluran BLT Dana Desa telah dilaksanakan di 30 kabupaten/kota yang mencakup 7.719 desa dengan jumlah penerima mencapai 308.155 KPM (kominfo, 2023). Pelaksanaan BLT-DD ini diperkuat melalui (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, 2020) yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga penyaluran bantuan lebih terarah dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin yang terdampak kondisi sosial ekonomi. Kriteria penerima BLT-DD diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 (BPK, 2020), yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa setempat dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, maupun bansos pemerintah lainnya. Pengaturan ini bertujuan menjamin penyaluran BLT-DD yang adil, transparan, dan menghindari tumpang tindih bantuan. Penetapan penerima BLT-DD dilakukan melalui Peraturan Kepala Desa berdasarkan pendataan KPM yang mengacu pada DTKS Kementerian Sosial.

Di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, BLT-DD diberikan kepada 46 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Proses pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dengan anggaran yang bersumber dari dana desa. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai Desember. Di Desa Tambak Kalisogo, penyaluran bantuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali, sehingga penerima memperoleh total Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per tahap penyaluran secara tunai (Penarakyat, 2025). Selain mekanisme penyaluran yang terjadwal, efektivitas BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo juga tercermin dari perubahan jumlah KPM dan besaran anggaran setiap tahun. Perkembangan ini menjadi indikator penting dalam menilai ketepatan sasaran program serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yang selanjutnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.

**Data Penerima BLT-DD Desa Tambak Kalisogo Jabon
Sidoarjo Tahun 2021-2025**

TAHUN	JUMLAH KPM	BESARAN BLT-DD	ANGGARAN
2021	80 KPM	Rp. 900.000/ 3 bulan	Rp. 288.000.000
2022	102 KPM	Rp. 900.000/ 3 bulan	Rp. 367.200.000
2023	59 KPM	Rp. 900.000/ 3 bulan	Rp. 212.400.000
2024	45 KPM	Rp. 900.000/ 3 bulan	Rp. 162.000.000
2025	46 KPM	Rp. 900.000/ 3 bulan	Rp. 165.600.000

Sumber: Dokumentasi Desa, telah diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) selama lima tahun terakhir, tercatat bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 80 KPM. Jumlah ini meningkat menjadi 102 KPM pada tahun 2022, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 59 KPM, yang mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah 45 KPM, kemudian sedikit meningkat menjadi 46 KPM pada tahun 2025. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun fluktuasi kecil di tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus dipertahankan dan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Meskipun secara umum menunjukkan tren positif, pelaksanaan BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas program. Permasalahan tersebut antara lain belum meratanya sasaran penerima dan keterbatasan anggaran yang menimbulkan persepsi sebagian masyarakat bahwa pelaksanaan BLT-DD oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo belum sepenuhnya efektif.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Zahrul Bawadi pada tahun 2023 dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan”.

Peneliti menggunakan indikator atau pengukuran efektivitas dari Sutrisno (2007) yaitu: Pemahaman program, Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tercapainya tujuan, dan Perubahan nyata. Hasil penelitiannya Pelaksanaan BLT-DD di Desa Tumbang Tungku, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan telah berjalan secara efektif, meskipun belum sepenuhnya sempurna.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Sifani Maydana Pratiwi, dan Hendra Sukmana pada tahun 2022 dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Sidoarjo”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data berasal dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitiannya menyampaikan pelaksanaan BLT-DD di Desa Mojoruntut telah berjalan cukup baik dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, Namun, masih terdapat kendala pada aspek disposisi, terutama terkait sikap tidak adil dan kecemburuan sosial dalam penentuan penerima manfaat, sehingga sebagian masyarakat merasa penyaluran belum sepenuhnya adi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ginalia Amanda pada tahun 2024 dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya mengungkapkan Pelaksanaan program BLT-DD di Kecamatan Cisitu secara keseluruhan belum cukup efektif dan masih terdapat sejumlah kendala seperti: Ketidaktepatan sasaran, Sosialisasi yang belum merata, Tujuan program belum tercapai maksimal, karena jumlah bantuan belum cukup mengatasi kemiskinan secara signifikan,

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas maupun implementasi BLT-DD di berbagai daerah, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek administratif dan capaian program tanpa mengkaji secara lebih mendalam dimensi sosial yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti potensi eksklusi sosial, persepsi ketidakadilan, dan kemungkinan ketergantungan terhadap bantuan. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena tidak hanya mengukur efektivitas berdasarkan indikator Sutrisno (2007), tetapi juga menganalisis dampak sosial pelaksanaan program pada tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan memperluas analisis efektivitas program bantuan sosial melalui pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi evaluatif bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi, ketepatan pendataan, serta penguatan strategi pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, program BLT-DD tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan kualitatif dipilih sebab peneliti ingin memahami fenomena sosial yang terjadi secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) yang memiliki lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran,

tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Key Informan adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyaluran BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo. Selain itu, peneliti juga mewawancarai dua orang warga Desa Tambak Kalisogo yang menerima BLT-DD sebagai informan tambahan untuk mengetahui pengalaman dan pandangan mereka terkait pelaksanaan program tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi literatur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh *Miles dan Huberman*, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Wilma & Hapsari, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program, terutama program pelayanan publik dan pemberdayaan Masyarakat (Harmini et al., 2024).

Untuk menilai ketercapaian tujuan program BLT-DD, efektivitas pelaksanaan dijadikan sebagai tolok ukur utama. Efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam kajian akademik, Sutrisno (2007) mengemukakan lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Indikator tersebut menjadi acuan dalam menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

1. Pemahaman Program

Menurut Sutrisno (2010) dalam (Fauziah et al., 2022) indikator pemahaman program adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program sangat diperlukan oleh para sasaran program agar program berjalan dengan baik. Pemahaman program merupakan aspek yang digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu memahami suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Syaifuddin Zuhri selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), yang menyatakan bahwa: *“Sosialisasi terkait BLT-DD ini dilakukan secara langsung kepada Masyarakat desa pada saat awal Covid-19 pada tahun 2020”*.

Untuk menguatkan informasi tersebut, peneliti juga melakukan wawancara langsung ke KPM Ibu Rini Sulistiyowati yang mengatakan *“nggih mbak, pihak desa pernah ngadaaken sosialisasi”, dan ibu rini juga berkata “dengan adanya sosialisasi niki kulo dados paham terkait informasi seperti jumlah bantuan, waktu penyaluran”*. Wawancara juga dilakukan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) lain yakni ibu asriyah yang mengatakan bahwa *“ pihak perangkat desa nggih telaten njelasaken terkait bantuan niki mbak”*. Sejauh ini berdasarkan wawancara antar pihak Pemerintah Desa Tambak Kalisogo dengan masyarakat penerima manfaat terkait pemahaman program ini, pihak desa sudah menyelenggarakan sosialisasi untuk program BLT-DD dan juga sejauh ini masyarakat yang menerima program BLT-DD tersebut sudah cukup memahami. Dengan hal ini proses komunikasi dua arah yang terjalin antara Masyarakat dengan pihak desa terbangun dengan baik. Dan pada poin

pemahaman program ini terpenuhi melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Tambak Kalisogo telah melaksanakan sosialisasi program BLT-DD dengan baik sehingga masyarakat penerima manfaat memiliki pemahaman yang cukup. Hal ini menunjukkan terbangunnya komunikasi dua arah yang efektif dan terpenuhinya indikator pemahaman program melalui kegiatan sosialisasi.

2. Tepat Sasaran

Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk menilai sejauh mana instansi atau lembaga mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tambak Kalisogo telah dilakukan sesuai ketentuan terkait ketepatan sasaran. Bapak M. Syaifuddin Zuhri (Kesra) menjelaskan bahwa: *“proses verifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan RT, RW, masyarakat, dan tokoh agama sebelum penetapan penerima BLT-DD”*. Verifikasi ini bertujuan untuk menilai dan memprioritaskan warga yang diajukan agar bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar layak menerima.

Gambar 1

Musdesus Penetapan Penerima BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo,
Jabon Sidoarjo.



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Tambak Kalisogo

Pada gambar 1 ditampilkan kegiatan Mudesus, proses penetapan penerima BLT-DD menjadi lebih transparan dan partisipatif. Dengan adanya verifikasi langsung di forum musdes, potensi data ganda dapat diminimalkan, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Bapak M. Syaifuddin Zuhri (Kesra) juga mengatakan bahwa *“dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dipastikan tidak ditemukan data ganda karena data ini sebelum diajukan, dilakukan verifikasi terlebih dahulu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) yang dinaungi oleh Kemensos”*, SIKS ini membantu dalam pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial, jadi siapa yang diajukan kita lihat terlebih dahulu diaplikasi tersebut apakah seorang tersebut masuk dalam situ atau tidak, dan semisal masuk secara otomatis kita ganti yang lain, agar tidak tumpang tindih dalam menerima bantuan. Namun, Bapak M. Syaifuddin Zuhri (Kesra) juga mengatakan bahwa Pelaksanaan BLT-DD ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terbatas pada anggaran, sehingga tidak semua bisa terbantu, oleh karena itu kita lakukan pemilihan mana yang benar-benar harus dibantu. Berdasarkan hasil observasi lapangan oleh peneliti terkait indikator tepat sasaran sudah dikatakan sudah sesuai atau sudah tepat.

3. Tepat Waktu

Dalam pelaksanaan BLT-DD, ketepatan waktu tercermin dari kemampuan pemerintah desa menyalurkan bantuan sesuai jadwal. Hal ini mencerminkan kesiapan dan profesionalitas pemerintah desa serta

berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut (Bawadi et al., 2023) ketepatan waktu berkaitan dengan penggunaan waktu dalam penyaluran program yang menuntut kesiapan pemerintah desa sebagai pelaksana, sehingga menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai harapan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyaluran BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, telah berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Bapak M. Syaifuddin Zuhri (Kesra) menyatakan bahwa: *“penyaluran dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali, dengan besaran bantuan Rp900.000”*. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Rini Sulistiyowati salah satu penerima manfaat yang mengatakan *“kalau saya mengambil bantuan BLT-DD niku angsal Rp. 900.000 setiap kali pencairan”*. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Aspiyah juga mengatakan bahwa *“bantuan BLT-DD memang disalurkan rutin setiap 3 bulan sekali dengan bantuan yang sama, yakni senilai Rp. 900.000”*.

Gambar 2

Penyaluran BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada gambar 2 ditampilkan proses kegiatan penyaluran BLT-DD rutin dilakukan setiap triwulan.

4. Ketercapaian Tujuan

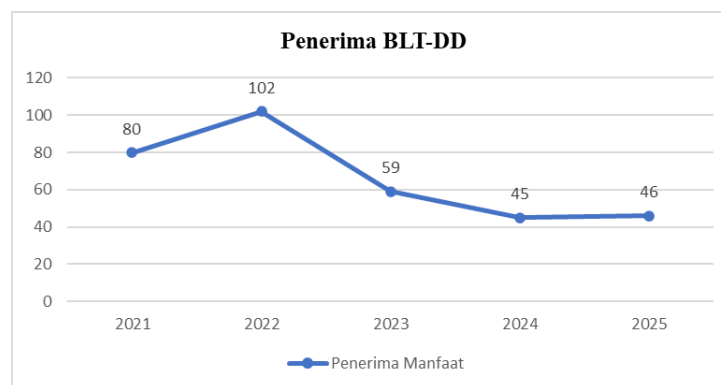
Tujuan merupakan rangkaian upaya dalam organisasi untuk mencapai target secara efektif. Dalam program Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa (BLT-DD), ketercapaian tujuan difokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil

penelitian di Desa Tambak Kalisogo, tujuan program BLT-DD dapat dikatakan telah tercapai dengan baik.

Hal tersebut ditunjukkan dari pernyataan Bapak M. Syaifuddin Zuhri (Kesra) yang menyebutkan bahwa *“jumlah penerima BLT-DD setiap tahun terus berkurang, menandakan adanya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Tambak Kalisogo, yang tercermin dari menurunnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun ke tahun.

Tabel 2

Jumlah KPM BLT-DD Desa Tambak Kalisogo Tahun 2021–2025.



Sumber: Dokumentasi Desa, telah diolah Peneliti

Berdasarkan data tersebut, ketercapaian tujuan BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo dapat dinilai cukup efektif. Program ini tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka peluang peningkatan kondisi ekonomi secara bertahap. Hal ini tercermin dari berkurangnya jumlah penerima manfaat setiap tahun, yang dapat dijadikan indikasi meningkatnya taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan indikator untuk menilai sejauh mana program memberikan dampak atau efek bagi masyarakat. Menurut Sunarti (2012) dalam (Bawadi et al., 2023), kesejahteraan

adalah kondisi kehidupan sosial, material, dan spiritual yang ditandai dengan rasa aman, tenteram, serta memungkinkan individu dan masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara optimal.

Dalam konteks program BLT-DD, perubahan nyata dapat dilihat dari upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, indikator perubahan nyata dinilai cukup efektif. Hal terlihat dari membaiknya kondisi ekonomi Kelompok Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup.

Berdasarkan wawancara dengan penerima manfaat Ibu Rini Sulistiyowati, mengatakan bahwa *“nggih mbak, bantuan niki sudah sangat mengubah ekonomi saya dimana uang tersebut bisa saya gunakan untuk membeli sembako,, kebutuhan rumah tangga dan untuk modal jualan kembali”*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan BLT-DD mampu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Aspiyah yang mengatakan bahwa *“bantuan BLT-DD ini sangat bermanfaat untuk ekonomi saya, dimana dengan bantuan ini setidaknya bisa mengcover kebutuhan sehari-hari saya seperti dibuat makan”*. Pernyataan-pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa program BLT-DD berhasil memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga penerima manfaat.

Gambar 3

Aktivitas usaha kecil salah satu penerima BLT-DD
di Desa Tambak Kalisogo



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3 memperlihatkan pemanfaatan BLT-DD secara produktif melalui usaha kecil yang dijalankan oleh salah satu penerima manfaat di Desa Tambak Kalisogo. Usaha tersebut menjadi sumber pendapatan tambahan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan perubahan nyata berupa meningkatnya kemandirian penerima manfaat yang memanfaatkan bantuan sebagai modal usaha kecil. Kondisi ini mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta turut menggerakkan perekonomian keluarga dan desa.

Meskipun secara umum pelaksanaan BLT-DD di Desa Tambak Kalisogo telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, implementasinya masih menyisakan sejumlah potensi dampak sosial yang perlu mendapat perhatian. Salah satu persoalan yang muncul ialah risiko eksklusi sosial, yakni kemungkinan masih terdapat warga miskin yang belum tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat keterbatasan kuota maupun anggaran. Situasi ini dapat memunculkan rasa tersisih ataupun ketidakpuasan dari masyarakat

yang merasa memenuhi kriteria, namun tidak tercakup dalam daftar penerima bantuan.

Selain itu, tantangan lain yakni munculnya persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Meskipun proses penetapan penerima telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa serta verifikasi data menggunakan aplikasi SIKS, sebagian warga masih menilai distribusi bantuan belum sepenuhnya merata. Apabila persepsi ini tidak diantisipasi melalui transparansi informasi dan komunikasi publik yang efektif, dapat menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat.

Di sisi lain, bantuan BLT-DD ini juga memiliki potensi menimbulkan ketergantungan apabila tidak dibarengi dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang berorientasi jangka Panjang, meskipun terdapat penerima manfaat yang memanfaatkan dana bantuan sebagai tambahan modal usaha mikro, namun upaya pendampingan, pelatihan keterampilan, serta penguatan kapasitas ekonomi harus tetap diperlukan agar bantuan tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, efektivitas program BLT-DD tidak hanya diukur dari terpenuhinya indikator administratif dan tercapainya target program, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu mengantisipasi dampak sosial negatif serta mengarahkan program menuju transformasi kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Tambak

Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo secara umum berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang sebagian besar telah terpenuhi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa membuat masyarakat penerima memahami program dengan baik, penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran melalui verifikasi data mendalam, serta dilakukan secara tepat waktu setiap tiga bulan sekali. Program ini juga terbukti mampu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tahun ke tahun. Selain itu, adanya perubahan nyata berupa peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemanfaatan bantuan sebagai modal usaha kecil menunjukkan kontribusi program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Meski demikian, keterbatasan anggaran dan persepsi sebagian masyarakat mengenai pemerataan bantuan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian agar efektivitas program ke depan dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, G. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai*. 9(2), 50–57.
- Bawadi, Z., Ratnasari, P., Raya, P., Raya, P., Waktu, T., Tungku, T., Pulau, K., & Kabupaten, M. (2023). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KECAMATAN PULAU MALAN Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. 9(1), 71–82.
- BPK. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/157246/pmk-no-222pmk072020>
- BPS. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- BPS Sidoarjo. (2024). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024*. <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>

-
- Fadhiela.ND, K., Faiza, & Bagio. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 8(1), 161–170. <https://doi.org/10.32585/ags.v8i1.4996>
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>
- Harmini, W., Abdi, A., & Yusuf, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(2), 271–282. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14145>
- Hasibuan, R. R. A., Kartika, A., Suwito, F. A., & Agustin, L. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Medan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 683–693. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i3.887>
- kominfo, J. (2023). *September Tahun 2023, Penyaluran Dana Desa Jatim Capai 80,54%*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/september-tahun-2023-penyaluran-dana-desaj-tim-capai-80-54>
- Nur'aini, S. M. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Department Of Public Administration , Faculty Of Social And Political Sciences ,. 14(1), 335–350.*
- Penarakyat. (2025). *Laksanakan Penyaluran BLT-DD tahap pertama Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon TA. 2025.* <https://penarakyatnews.id/2025/03/13/laksanakan-penyaluran-blt-dd-tahap-pertama-desa-tambak-kalisogo-kecamatan-jabon-ta-2025/>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020,
- Pub. L. No. 6 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139739/permendes-pdtt->

no-6-tahun-2020

PMK No. 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (2022).

RI, H. K. (2025). *Jumlah Penduduk Miskin Turun, Mensesneg: Pemerintah Terus Bekerja Keras Atasi Kemiskinan*. Juli.
https://www.setneg.go.id/baca/index/jumlah_penduduk_miskin_turun_mensesneg_pemerintah_terus_bekerja_keras_atasi_kemiskinan

Rohman, m. syaiful. (2024). *Angka Kemiskinan di Sidoarjo Turun, Pembagian Beras Salah Satu Faktornya*. Radar Sidoarjo.
<https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/854963772/angka-kemiskinan-di-sidoarjo-turun-pembagian-beras-salah-satu-faktornya>

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169–193. <https://doi.org/10.24246/persi.v2i2.p169-193>